

Dari Kali Code ke Ruang Digital: Meneguhkan Filsafat Memanusiakan Manusia Romo Mangun sebagai Etika Publik Generasi Kontemporer

Yanto ^{a,1}

^a Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Indonesia

¹ yantoboni79@gmail.com

Kata Kunci:

Era Digital, Filsafat Pancasila, Ekologi Integral, Etika Keberlanjutan, Romo Mangunwijaya.

Abstrak

Berbagai persoalan etika dan keberlanjutan, mulai dari krisis lingkungan hingga disrupsi digital, berakar pada cara pandang yang memisahkan manusia, alam, dan teknologi. Penelitian kualitatif ini bertujuan menganalisis urgensi Ekologi Integral sebagai kerangka etika transformatif yang berlandaskan Filsafat Pancasila di era digital, dengan menjadikan pemikiran Romo Y.B. Mangunwijaya sebagai model penerapan Ekologi Sosial dan Hak Asasi Manusia. Melalui studi pustaka dan analisis filosofis, penelitian ini mengkaji peran Ekologi Integral dalam menjembatani krisis lingkungan dan digital, nilai-nilai moral Pancasila dalam etika publik, serta relevansi gagasan Romo Mangun untuk memanusiakan seluruh ciptaan di era teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis keberlanjutan memerlukan pendekatan holistik yang memandang kerusakan lingkungan sebagai bentuk ketidakadilan sosial. Selain itu, ditemukan tiga prinsip etis utama: kemajuan teknologi harus dikendalikan oleh nilai kemanusiaan, etika publik harus mengintegrasikan tanggung jawab ekologis, dan generasi muda perlu berpartisipasi aktif dalam demokrasi yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian, Ekologi Integral yang berlandaskan Pancasila menawarkan kerangka etis untuk membangun kesadaran kritis terhadap teknologi dan lingkungan secara seimbang.

From the Code River to the Digital Realm: Affirming Romo Mangun's Philosophy of Humanizing Humanity as a Public Ethic for the Contemporary Generation

Keywords:

Integral Ecology, Pancasila Philosophy, Sustainability Ethics, Digital Age, Father Mangunwijaya.

Abstract

Contemporary ethical and sustainability challenges, ranging from environmental crises to digital disruption, stem from a fragmented view that separates humanity, nature, and technology. This qualitative study examines the urgency of Integral Ecology as a transformative ethical framework grounded in the philosophy of Pancasila in the digital era, using the thought of Y.B. Mangunwijaya as a model for integrating Social Ecology and Human Rights. Employing a literature review and philosophical analysis, the study explores how Integral Ecology addresses environmental and digital challenges, identifies the core moral values of Pancasila for public ethics, and examines the relevance of Mangunwijaya's vision of "humanizing humanity" as a basis for "humanizing all creation" in a technological age. The findings indicate that sustainability crises require a holistic perspective in which environmental degradation is understood as a form of social injustice. Three key ethical principles emerge: technological development must remain guided by human dignity, public ethics must integrate ecological responsibility, and younger generations should actively participate in environmentally responsible democratic practices. Therefore, an Integral Ecology grounded in Pancasila provides an ethical framework for fostering critical and balanced engagement with technology and the environment.

Pendahuluan

Dunia saat ini sedang menghadapi dua tantangan besar yang saling terkait krisis lingkungan global yang semakin parah dan perubahan teknologi digital yang sangat cepat. Di satu sisi, Bumi menghadapi ancaman nyata mulai dari perubahan iklim, hilangnya banyak spesies, hingga menipisnya sumber daya yang menuntut kita semua untuk mengubah cara hidup. Di sisi lain, teknologi digital, seperti kecerdasan buatan (AI) dan internet global, telah mengubah

total cara masyarakat berinteraksi, berbisnis, dan mengatur pemerintahan¹. Ironisnya, teknologi, yang diharapkan bisa menyelamatkan lingkungan, justru menciptakan masalah etika dan ekologi baru. Contohnya, infrastruktur digital yang besar, termasuk pusat data yang butuh banyak listrik dan limbah elektronik yang beracun, menunjukkan bahwa kemajuan teknologi belum tentu sejalan dengan kelestarian alam. Hubungan yang rumit antara manusia, alam, dan teknologi ini menunjukkan bahwa kerangka etika lama sudah tidak memadai. Etika yang selama ini dominan cenderung hanya berfokus pada hubungan moral antar sesama manusia (antropopetris), menganggap alam hanya sebagai benda yang boleh dieksploitasi, dan melihat teknologi sebagai alat netral tanpa nilai moral². Pandangan yang memisahkan manusia dari lingkungannya ini terbukti gagal dalam menghadapi era modern, di mana kerusakan lingkungan adalah bentuk nyata dari ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, kita sangat butuh untuk mengembangkan kerangka etika baru yang lebih luas. Kerangka ini harus bisa menjembatani kesenjangan antara inovasi teknologi yang ngebut, tujuan pembangunan ekonomi, dan prinsip penting untuk menjaga kelestarian alam demi masa depan bersama³.

Melihat kebutuhan filosofis yang mendesak ini, penelitian ini mengajukan dan mengkaji ekologi integral sebagai kerangka berpikir etika yang transformatif untuk isu keberlanjutan. Ekologi integral melihat segala sesuatu secara menyeluruh (holistik), meyakini bahwa krisis lingkungan tidak bisa dipisahkan dari krisis sosial, moral, dan budaya yang ada⁴. Untuk memastikan kerangka ini relevan dan kuat di Indonesia, etika ini harus didasarkan pada Filsafat Pancasila. Pancasila, dengan lima silanya yang mencakup nilai Ketuhanan hingga Keadilan Sosial, memberikan landasan moral yang khas. Ia menuntut adanya etika publik yang menempatkan martabat manusia dan keadilan lingkungan, termasuk tanggung jawab kepada generasi mendatang sebagai prinsip moral utama dalam menghadapi guncangan teknologi dan krisis lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ekologi integral dapat menjawab tantangan disrupti digital dan krisis lingkungan secara bersamaan. Selain itu, penelitian ini akan mencari tahu nilai

¹ Mastriati dkk, *Peran Teknologi Dan Hukum Bisnis Di Era Globalisasi Ekonomi*. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK) p-ISSN: 2964-8858 e-ISSN: 2963-3087 Vol. 3, No. 3, November 2024. Hal. 897.

² Harry, *Hubungan Manusia, Alam Dan Ilmu Pengetahuan, Sebuah Telaah Sederhana*. Proceeding. Seminar Nasional PESA T 2005. Hal. 1

³ Linus, *Melampaui Antropocentrism: Ekoteologi dan Etika Lingkungan dalam Dialog, Sebuah Pendekatan Interdisipliner Untuk Keberlanjutan dan Keadilan Ekologis*, Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja 8, no. 2 (2024): 166-178. Hal. 169.

⁴ Maria, *Pendekatan Ekologi Integral Untuk Mengatasi Krisis Lingkungan Hidup Menurut Paus Fransiskus*, Jurnal Pendidikan, Katekese, Dan Pastoral, Volume 13, Nomor 1, Juni 2025. Hal. 22.

moral Pancasila mana yang paling penting untuk diterapkan dalam etika publik, dan bagaimana semangat Romo Y.B. Mangunwijaya untuk "memanusiakan manusia" bisa diperluas untuk "memanusiakan seluruh ciptaan" di era teknologi. Dengan menggunakan studi literatur dan analisis filosofis, kontribusi penelitian ini sangat krusial, tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya ekologi integral sebagai etika baru, tetapi juga menyajikan panduan etika berdasarkan kearifan lokal pancasila, yang sangat penting untuk membentuk kesadaran kritis generasi muda agar bersikap seimbang dan bertanggung jawab terhadap teknologi dan lingkungan.

Landasan Konseptual: Ekologi Integral dan Filsafat Pancasila

Ekologi Integral sebagai Kerangka Holistik:

Ekologi Integral adalah pandangan filosofis baru yang diajukan untuk mengatasi krisis keberlanjutan yang ada⁵. Inti dari pandangan ini adalah menyatukan kembali manusia, alam, dan teknologi yang sering kali dipisahkan, karena pemisahan tersebut dianggap sebagai sumber masalah. Konsep ini bersifat menyeluruh, melihat kerusakan lingkungan selalu berhubungan erat dengan krisis sosial, moral, dan budaya. Ekologi Integral bergerak dalam tiga dimensi utama. Pertama, Ekologi Lingkungan, fokus pada perlindungan ekosistem dan sumber daya. Kedua, Ekologi Sosial, mencakup keadilan, etika, dan tata kelola masyarakat. Ketiga, Ekologi Mental Budaya, berkaitan dengan nilai dan cara pikir kita⁶. Prinsip dasarnya jelas, yaitu upaya memulihkan alam dan meningkatkan kualitas hidup manusia adalah satu tugas tunggal yang tidak bisa dipisahkan. Perlakuan kita terhadap alam sangat menentukan perlakuan kita terhadap sesama manusia. Dalam perspektif ini, kerusakan lingkungan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga cerminan dari ketidakadilan sosial, sebab eksploitasi alam sering kali merugikan kelompok masyarakat paling rentan. Hal ini menegaskan bahwa keadilan sosial adalah keadilan lingkungan. Oleh karena itu, kerangka berpikir ini menuntut adanya etika publik yang mengintegrasikan tanggung jawab ekologis sebagai bagian dari upaya penegakan keadilan, sekaligus membentuk kesadaran kritis masyarakat tentang teknologi dan lingkungan.

⁵ Andini, R. (2022). Konservasi lingkungan berbasis ekologi integral perspektif al-qur'an. (Disertasi doktoral). Diambil dari Google Scholar. Hal. 8.

⁶ Andini, Ridlo. "Pendidikan Lingkungan Berbasis Ekologi Integral Dan Implementasinya Dalam Dunia Pendidikan." *Mauizhah: Jurnal Kajian Keislaman* 13.2 (2023): 332-340. Hal. 5.

Pancasila sebagai Sumber Etika Transformatif:

Filsafat Pancasila menawarkan landasan etika yang kuat dan sesuai dengan konteks Indonesia bagi pandangan Ekologi Integral. Analisis sila-sila Pancasila menunjukkan hal ini. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menanamkan kesadaran bahwa manusia adalah bagian dari ciptaan Tuhan, sehingga menuntut sikap hormat dan bertanggung jawab terhadap alam sebagai anugerah Ilahi yang harus dijaga, bukan sekadar objek eksploitasi. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab diperluas maknanya menjadi etika yang tidak hanya berpusat pada manusia, menegaskan bahwa martabat manusia terkait erat dengan martabat alam itu sendiri, dan menekankan bahwa kemajuan teknologi harus selalu dikendalikan oleh nilai kemanusiaan⁷. Terakhir, Sila Persatuan Indonesia menjadi perintah untuk membangun solidaritas bersama dalam menghadapi krisis lingkungan, menuntut generasi muda berpartisipasi aktif dalam upaya politik dan demokrasi yang pro lingkungan⁸.

Pancasila lebih dari sekadar aturan moral, ia menawarkan pandangan tentang manusia yang berbeda secara mendasar dari paham individualisme bebas yang sering membiarkan eksploitasi. Pancasila menempatkan manusia sebagai makhluk yang berdimensi sosial, sangat menekankan tanggung jawab bersama dan keadilan sosial sebagai dasar utama⁹. Sudut pandang ini mengharuskan Etika Publik secara jelas menggabungkan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keadilan sosial, sejalan dengan sila kelima. Dengan demikian, Pancasila menyediakan kerangka aturan yang melampaui kepentingan diri sendiri, mengarahkan generasi masa kini untuk mewujudkan kebaikan bersama atau *bonum commune*, yang meliputi keseimbangan antara manusia, teknologi, dan keutuhan ciptaan.

Tantangan Etika di Era Digital (Kajian Filsafat dan Perkembangan Teknologi Informasi)

Jejak Karbon Digital dan Etika Konsumsi:

Meskipun Era Digital memberikan banyak kemudahan, ia juga menghasilkan jejak karbon digital yang besar, sehingga kita perlu meninjau ulang etika konsumsi kita. Dampak lingkungan dari teknologi tidak hanya

⁷ Irayanti, Irma, and Kokom Komalasari. "Membangun Etika Kewarganegaraan Global Melalui Karakter Moral Pancasila: Analisis Konseptual." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 13.1 (2023): 21-34. Hal 26

⁸ Astardinata, Adib Irfansyah, Muhammad Al-Kautsar Ridho, and Elsa Febri Saputri. "Implementasi Makna Nilai Pancasila Sila Ke-3." *Indigenous Knowledge* 2.5 (2023): 375-380. Hal 6.

⁹ Wahana, Paulus. Menerapkan etika nilai max scheler dalam perkuliahan pendidikan pancasila untuk membangun kesadaran moral mahasiswa. Gadjah Mada University, 2016. Hal 194.

berasal dari sampah elektronik saat produksi gawai, tetapi juga dari penggunaan energi yang sangat besar oleh pusat data yang menjalankan internet, termasuk proses intensif seperti penambangan mata uang kripto. Konsumsi energi yang tinggi ini langsung berkontribusi pada emisi gas rumah kaca, yang menunjukkan bahwa kemajuan teknologi, tanpa kendali etika, bisa bertentangan dengan tujuan keberlanjutan¹⁰. Oleh karena itu, kita membutuhkan etika konsumsi digital yang menuntut pengguna menyadari secara kritis siklus hidup perangkat mereka dan dampak lingkungan dari kebiasaan seperti *streaming* atau menyimpan data secara berlebihan. Secara filosofis, muncul pertanyaan: Apakah kebebasan mengakses informasi harus dibatasi oleh tanggung jawab lingkungan? Dalam pandangan Ekologi Integral, Sila Kemanusiaan dan Keadilan Sosial Pancasila menyiratkan bahwa kebebasan digital tidak boleh merusak martabat alam dan hak generasi mendatang atas lingkungan yang sehat. Filsafat Pancasila, yang menekankan tanggung jawab bersama, menentang pandangan kebebasan individu yang menganggap akses tak terbatas sebagai hak mutlak tanpa memperhitungkan kerugian lingkungan¹¹. Maka, kerangka etika yang transformatif harus menyeimbangkan inovasi dan akses informasi dengan keharusan moral untuk membatasi jejak karbon digital, mengubah penggunaan teknologi dari sekadar alat netral menjadi praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Transformasi Sosial dan Keadilan Digital:

Transformasi digital memiliki sisi moral, sosial, dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang penting, terutama terkait masalah kesenjangan digital. Walaupun teknologi informasi sangat berpotensi memajukan demokrasi dan akses pengetahuan, jika tidak diatur, ia justru akan memperburuk ketidakadilan sosial. Kesenjangan ini bukan hanya soal kurangnya akses ke komputer dan internet, tetapi juga soal kurangnya pemahaman teknologi, tingginya biaya, dan masalah representasi data. Semua ini membatasi hak-hak dasar warga negara, seperti hak mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam ruang publik secara adil. Dalam pandangan Ekologi Integral, ketidakadilan digital adalah bagian dari krisis sosial yang lebih besar. Ironisnya, teknologi yang sering disebut sebagai alat pembebasan justru dapat menciptakan bentuk penindasan dan ketidakadilan baru jika tidak dikendalikan oleh etika publik yang kuat. Masalah seperti bias pada algoritma, pengawasan massal, dan

¹⁰ Kirana, Nur Fadellya April, et al. "Membangun Kesadaran Konsumen Tentang Produk Ramah Lingkungan Melalui Platform Digital." *Seminar Nasional Agribisnis*. Vol. 2. No. 1. 2025.

¹¹ Kirana, Nur Fadellya April, et al. "Membangun Kesadaran Konsumen Tentang Produk Ramah Lingkungan Melalui Platform Digital." *Seminar Nasional Agribisnis*. Vol. 2. No. 1. 2025. Hal 152.

dominasi perusahaan teknologi besar berpotensi melemahkan kebebasan pribadi dan merusak demokrasi. Oleh karena itu, Filsafat Pancasila menjadi perintah moral yang menawarkan solusi. Tiga perintah moral yang ditemukan, yaitu bahwa kemajuan teknologi harus dikendalikan oleh Sila Kemanusiaan dan Etika Publik harus memasukkan tanggung jawab lingkungan sebagai bagian dari keadilan sosial, menegaskan bahwa teknologi harus melayani martabat manusia dan memastikan adanya keadilan¹². Tanpa etika publik yang kokoh, inovasi digital berisiko menjadi kekuatan yang menindas, bukannya memanusiakan.

Untuk mengatasi Jejak Karbon Digital yang besar dan ancaman keadilan digital yang baru, jelas bahwa solusi teknis saja tidak cukup. Kita memerlukan pandangan gabungan yang berakar pada etika. Di sinilah Ekologi Integral yang berlandaskan Pancasila menawarkan panduan etika yang relevan. Kerangka ini menuntut kesadaran kritis bahwa krisis lingkungan dan masalah digital adalah dua sisi dari krisis moral dan budaya yang sama. Dengan berpegang teguh pada perintah moral Sila Kemanusiaan, kemajuan teknologi harus diarahkan untuk "memanusiakan keutuhan ciptaan". Tujuannya adalah memastikan bahwa inovasi digital mendukung kelestarian alam dan keadilan sosial, bukan malah memperburuk kerusakan lingkungan dan kesenjangan digital. Singkatnya, etika yang menyeluruh ini sangat penting untuk membentuk generasi masa kini yang bertanggung jawab, yang mampu menyeimbangkan inovasi teknologi dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat¹³.

Sintesis Solusi: Implementasi Ekologi Integral Berbasis Pancasila

Penerapan Ekologi Integral dalam Kebijakan Publik:

Penerapan Ekologi Integral berbasis Pancasila adalah solusi etika mendesak yang harus diterapkan dalam Kebijakan Publik, terutama di tengah krisis lingkungan dan masalah digital saat ini. Kerangka ini menuntut agar nilai-nilai ekologis dimasukkan secara mendasar ke dalam kebijakan negara, tidak hanya sekadar mematuhi peraturan lingkungan yang ada. Secara nyata, Sila Persatuan Indonesia harus diwujudkan melalui kebijakan pembangunan dan tata ruang yang menjamin kelestarian ekosistem sebagai aset bersama bangsa, sekaligus menuntut rasa solidaritas antar generasi. Sementara itu, Sila

¹² Faradila, Ayu Hanita, Holilulloh Holilulloh, and M. Mona Adha. "Pengaruh Pemahaman Ideologi Pancasila Terhadap Sikap Moral Dalam Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila." *JURNAL KULTUR DEMOKRASI (JKD)* 2.7 (2014).

¹³ Hutahaean, Juanda Tiolopan, Masduki Asbari, and Freddy Nurwanto. "Urgensi Sadar Lingkungan di Era Teknologi." *Journal of Information Systems and Management (JISMA)* 2.6 (2023): 47-49.

Kemanusiaan yang adil dan beradab berfungsi sebagai pengendali moral, memastikan bahwa kemajuan teknologi, termasuk infrastruktur digital, selalu dikontrol demi menjaga martabat manusia dan keutuhan ciptaan¹⁴. Hal ini sangat berkaitan dengan Demokrasi, di mana Etika Publik harus menjamin partisipasi masyarakat yang luas dan berarti dalam setiap pengambilan keputusan tentang lingkungan. Dengan demikian, kebijakan negara tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan lingkungan, sekaligus meneruskan semangat Romo Mangunwijaya untuk menggerakkan partisipasi generasi muda dalam upaya demokrasi yang berpihak pada lingkungan¹⁵.

Revitalisasi Pendidikan Kontemporer (Kajian Filsafat dan Pendidikan):

Untuk menerapkan etika transformatif dari Ekologi Integral dan Pancasila, sistem pendidikan saat ini harus diubah secara menyeluruh agar generasi muda memiliki kesadaran kritis. Perubahan ini menuntut dimasukkannya ide "Pendidikan yang Membebaskan" yang dicetuskan oleh Romo Mangunwijaya. Pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada pelatihan teknis atau keterampilan yang diminta pasar. Sebaliknya, pendidikan harus menanamkan tanggung jawab etis yang mendalam terhadap teknologi yang mereka gunakan dan alam tempat mereka tinggal¹⁶. Tujuannya adalah membangun pemahaman yang utuh pada siswa, melalui berbagai disiplin ilmu, bahwa masalah lingkungan adalah masalah ketidakadilan sosial. Dengan cara ini, pendidikan diharapkan menghasilkan individu yang tidak hanya mahir dalam teknologi digital, tetapi juga mewarisi semangat Romo Mangun untuk memanusiakan seluruh ciptaan, sehingga mereka mampu berpartisipasi aktif dalam upaya demokrasi yang peduli lingkungan.

Etika Publik sebagai Kontrol Sosial:

Etika Publik harus berfungsi sebagai kontrol sosial yang kuat, sangat penting untuk menyeimbangkan dampak negatif modernitas dan masalah digital yang sering mengancam nilai-nilai kebersamaan dan kelestarian alam. Dalam kerangka Ekologi Integral berbasis Pancasila, hal ini menuntut penguatan studi moral sosial dan nilai-nilai keagamaan etnis sebagai sumber kearifan utama. Pemanfaatan kearifan lokal, seperti berbagai tradisi merawat

¹⁴ Munandar, Dino Haris, et al. "TANTANGAN DAN DINAMIKA TRANSFORMASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA EKOLOGI DAN PEMBANGUNAN KOTA-DESA." (2024): 28-37.

¹⁵ RAHARJA, UMAR ABDURRAHMAN. "PEMIKIRAN POLITIK ROMO MANGUNWIJAYA: MENJAGA KEHIDUPAN BERBANGSA DENGAN NILAI-NILAI BUDAYA."

¹⁶ Rahayuningtyas, Dyah. "Wacana Pendidikan Pluralisme dalam Perspektif Romo Mangun Wijaya." *PLURALISME, MULTIKULTURALISME*: 65.

alam yang diwariskan turun temurun, menjadi sangat penting karena ia menawarkan penawar terhadap pola pikir eksploitatif¹⁷. Tradisi ini secara mendasar mencerminkan nilai Sila Ketuhanan, yaitu menghormati ciptaan, dan Sila Persatuan, yaitu solidaritas masyarakat. Dengan mengangkat kearifan lokal ini ke tingkat Etika Publik, negara dan masyarakat memiliki benteng etis untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi, termasuk infrastruktur digital, tidak menimbulkan ketidakadilan sosial atau merusak lingkungan. Dengan demikian, terwujudlah keadilan lingkungan yang sejalan dengan Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penutup

Penelitian ini menegaskan bahwa krisis lingkungan global dan tantangan etika di Era Digital bersumber dari pemisahan antara alam, manusia, dan teknologi. Masalah ini menuntut adanya kerangka etika yang menyeluruh dan transformatif. Ekologi Integral diajukan sebagai jawaban filosofis, yang mengharuskan kita mengakui bahwa kerusakan lingkungan adalah cerminan dari ketidakadilan sosial, sehingga memulihkan keutuhan ciptaan adalah tanggung jawab moral bersama. Agar kerangka ini kuat dan relevan di Indonesia, penelitian ini menempatkan Filsafat Pancasila sebagai dasar yang sesuai dengan konteks negara. Analisis sila Pancasila menghasilkan tiga perintah moral utama: teknologi harus dikendalikan oleh Sila Kemanusiaan demi martabat alam dan manusia; Etika Publik harus menggabungkan tanggung jawab lingkungan sebagai bagian dari keadilan sosial; dan generasi muda harus aktif dalam demokrasi yang pro lingkungan, meneruskan semangat Romo Y.B. Mangunwijaya untuk "memanusiakan keutuhan ciptaan." Dengan demikian, Ekologi Integral berbasis Pancasila menawarkan sebuah pedoman moral untuk menghadapi kerumitan Era Digital, mengarahkan bangsa menuju pembangunan yang seimbang dan beretika.

Penerapan solusi ini membutuhkan pembenahan menyeluruh di tingkat kebijakan dan pendidikan. Pada sektor publik, hal ini berarti harus memasukkan nilai-nilai lingkungan secara mendasar ke dalam setiap kebijakan negara, didukung oleh Etika Publik yang kuat dan bersumber dari kearifan lokal sebagai pengendali sosial terhadap dampak buruk modernitas. Sementara itu, di sektor pendidikan, diperlukan Pendidikan yang Membebaskan untuk membangun kesadaran utuh pada generasi muda, mengajarkan mereka tanggung jawab etis terhadap teknologi dan alam, bukan hanya fokus pada

¹⁷ Awang, Nirwasui Arsita, Yusak B. Setyawan, and Ebenhaizer L. Nuban Timo. "Ekoteologi Fungsi Hutan Oenaek: Penyimpangan Paradigma Ekologis Menuju Perilaku Eksploitatif." *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian* 4.2 (2019): 135-154.

kemampuan teknis. Singkatnya, Ekologi Integral berlandaskan Pancasila bukan sekadar teori, tetapi merupakan panduan praktis yang sangat penting. Ini akan membentuk kesadaran kritis bagi generasi masa kini agar tidak hanya menjadi konsumen pasif di era digital, tetapi menjadi agen perubahan yang bertanggung jawab, yang menjamin martabat manusia dan kelestarian lingkungan untuk masa depan bersama.

Daftar Pustaka

- Andini, R. 2022. *Konservasi Lingkungan Berbasis Ekologi Integral Perspektif Al-Qur'an*. Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta.
- Andini, R. 2023. "Pendidikan Lingkungan Berbasis Ekologi Integral dan Implementasinya dalam Dunia Pendidikan." *Mauizhah: Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 2: 332–340.
- Astardinata, A. I., M. A. K. Ridho, and E. F. Saputri. 2023. "Implementasi Makna Nilai Pancasila Sila Ke-3." *Indigenous Knowledge* 2, no. 5: 375–380.
- Awang, N. A., Y. B. Setyawan, and E. L. N. Timo. 2019. "Ekoteologi Fungsi Hutan Oenaek: Penyimpangan Paradigma Ekologis Menuju Perilaku Eksploitatif." *Gema Teologika: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian* 4, no. 2: 135–154.
- Dewi, M. H. H., and H. Diana. 2024. "Peran Teknologi dan Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 3: 895–906.
- Faradila, A. H., Holilulloh, and M. M. Adha. 2014. "Pengaruh Pemahaman Ideologi Pancasila terhadap Sikap Moral dalam Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila." *Jurnal Kultur Demokrasi* 2, no. 7.
- Hutahaean, J. T., M. Asbari, and F. Nurwanto. 2023. "Urgensi Sadar Lingkungan di Era Teknologi." *Jurnal Sistem dan Manajemen Informasi (JISMA)* 2, no. 6: 47–49.
- Irayanti, I., and K. Komalasari. 2023. "Membangun Etika Kewarganegaraan Global melalui Karakter Moral Pancasila: Analisis Konseptual." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 13, no. 1: 21–34.
- Kirana, N. F. A., Z. Rozaki, R. Wulandari, and L. M. Sari. 2025. "Membangun Kesadaran Konsumen tentang Produk Ramah Lingkungan melalui Platform Digital." In *Seminar Nasional Agribisnis*, vol. 2, no. 1, 149–154.
- Mufrizon, H. 2005. "Hubungan Manusia, Alam dan Ilmu Pengetahuan: Sebuah Telaah Sederhana."
- Munandar, D. H., V. J. Purnama, H. F. Simanjuntak, and S. Rahmadani. 2024. "Tantangan dan Dinamika Transformasi Kebijakan Pemerintah pada Ekologi dan Pembangunan Kota-Desa."
- Raharja, U. A. n.d. *Pemikiran Politik Romo Mangunwijaya: Menjaga Kehidupan Berbangsa dengan Nilai-Nilai Budaya*.
- Rahayuningtyas, D. n.d. "Wacana Pendidikan Pluralisme dalam Perspektif Romo Mangun Wijaya." In *Pluralisme, Multikulturalisme*, 65.
- Sumule, L. 2024. "Melampaui Antropocentrism: Ekoteologi dan Etika Lingkungan dalam Dialog, Sebuah Pendekatan Interdisipliner untuk Keberlanjutan dan Keadilan Ekologis." *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja* 8, no. 2: 166–178.
- Wahana, P. 2016. *Menerapkan Etika Nilai Max Scheler dalam Perkuliahan Pendidikan Pancasila untuk Membangun Kesadaran Moral Mahasiswa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

- Wenehenubun, M. H. 2025. "Pendekatan Ekologi Integral untuk Mengatasi Krisis Lingkungan Hidup Menurut Paus Fransiskus." *Logos: Jurnal Pendidikan, Katekese, dan Pastoral* 13, no. 1: 19–42.
- "Computer Program?" *Scientific American* 262, no. 1 (January 1990): 25–31.